

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT. BPR Profidana Paramitra Yogyakarta sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah. Tujuan dilakukannya penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa konsistensi pengaturan parate eksekusi dalam Undang-undang Hak Tanggungan. Peneliti ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yang melukiskan fakta-fakta berupa data sekunder yang berhubungan dengan hukum jaminan khususnya jaminan kebendaan dalam perbankan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Penulis dapat mengetahui bahwa meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT. BPR Profidana Paramitra, namun parate eksekusi Hak Tanggungan dapat berperan besar dalam menurunkan jumlah kredit bermasalah di PT. BPR Profidana Paramitra Yogyakarta. Penulis juga menyimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi pengaturan parate eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-undang Hak Tanggungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan PT. BPR Profidana Paramitra Yogyakarta hendaknya mengoptimalkan lagi pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan untuk menyelesaikan kredit bermasalah, mengingat pelaksanaannya lebih efektif dibandingkan dengan eksekusi melalui pengadilan Negeri (*fiat pengadilan*). Pemerintah bersama DPR RI hendaknya memberikan prioritas dan percepatan dalam merevisi Undang-undang Hak Tanggungan khususnya terhadap pasal-pasal yang bertentangan atau tidak konsisten dalam mengatur pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, terutama mengenai parate eksekusi Hak Tanggungan.

Kata Kunci : Parate Eksekusi Hak Tanggungan

ABSTRACT

Parate executie is simplification execution without involving the courts, while grosse deed is among one copy of the deed of acknowledgment of debt by the head of the deed “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” who has the power executorial. This study discusses the implementation of the self enforcement of Hak Tanggungan carried out by PT, BPR Profidana Paramitra Yogyakarta as an alternative to the settlement of problem loan . This study aims to investigated and analisys the role of the self enforcement of Hak Tanggungan in resolwing problem loans in PT. BPR Profidana Paramitra Yogyakarta, and its obstacles econuntered, also to know and analism consistency of self enforcement arrangement in Indonesian Law of Hak Tanggungan. This study is using normative juridisial approach to the specifications of analytical descriptive study that describes the facts in the form of secondary data relating to the security law, especially for material security in banking. Based on the result of research conducted, the author is able to know that although there are obstacles in the implementation of the self enforcement of Hak Tanggungan by PT. BPR. Profidana Yogyakarta, howefer the self enforcement of Hak Tanggungan may play a role in lowering the number of problem loans in PT. BPR. Profidana Paramitra Yogyakarta. The autor also concluded that there is inconsistency of self enforcement arrangements in Indonesian Law of Hak Tanggungan. Based on the results of this research, the Author suggests PT. BPR. Profidana Paramitra Yogyakarta, to optimize the implementation of self enforcement to increase loans settlement, considering such implementation will create more Government with the Parliament should give priority and acceleration in the revised Indonesia Law of Hak Tanggungan especially against provisions that contradict or inconsistent in regulating the enforcement of Hak Tanggungan especially regarding of the self enforcement of Hak Tanggungan.

Key word : *The role Self Enforcement (Parate Executie) of Security Right of land (Hak Tanggungan)*